KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Rapat Maraton, DPR Pede RUU MD3 Tuntas On Time
Tanggal : Sabtu, 21 Juni 2014
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Rapat Maraton, DPR Pede RUU MD3 Tuntas On Time

Pembahasan UU MD3 belum menemukan titik terang. Padahal, masa tugas DPR periode ini tersisa dua bulan lagi.

MUNGKINKAH revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3) akan kelar periode sekarang? Anggota Pansus RUU MD3 Syarifuddin Sudding optimis, revisi UU MD3 bisa kelar bulan depan.

Sudding mengatakan, dengan bekerja secara marathon dan efisien, disisa waktu dua bulan lagi, DPR bisa menyelesaikan revisi UU MD3.

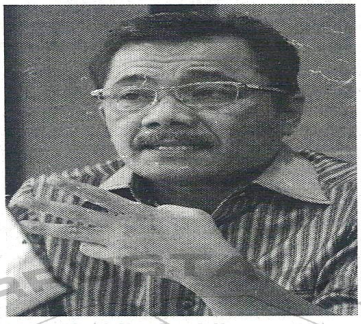
"Ini kan terus berjalan sejak lama dan kita genjot. Kita harapkan *ontime* waktu selesainya," kata politisi Partai Hanura itu, kemarin.

Revisi UU No. 27 Tahun 2009 atau biasa disebut UU MD3, saat ini digarap Panitia Khusus (Pansus) DPR. Kalangan Dewan akan kembali mengatur kedudukan dan susunan empat lembaga Negara; MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Namun masih banyak klausul yang diperdebatkan. Misalnya soal jatah kursi pimpinan DPR untuk partai politik atau fraksi dengan suara terbanyak secara berurut, keberadaan Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Sudding mengungkapkan, salah satu poin yang sudah menemui titik terang adalah keberadaan Banggar DPR yang perlu dievaluasi. Banyak fraksi mendukung Banggar dibubarkan. Pembubaran Banggar secara permanen diyakini bisa mengurangi penyimpangan yang berujung korupsi.

"Orientasi untuk melakukan penyimpangan dalam persoalan korupsi dan sebagainya. Nanti bisa menguatkan bidang legislasi dan kontrol *budgeting*. Jadi,



Syarifuddin Sudding

Banggar ini kita bubarkan secara permanen. Tapi fungsi anggaran tetap ada di dewan. Kemudian kita kembalikan ke panitia dewan yang sifatnya ad hoc," ujarnya.

Poin lainnya, soal BK yang bakal diubah menjadi Mahkamah Kehormatan. Tujuannya, untuk meningkatkan produktivitas kinerja anggota Dewan. Dengan memaksimalkan Mahkamah Kehormatan, diharapkan penerapan etika dan sanksi akan lebih tegas.

"Nanti kalau ada anggota dewan yang tersangkut suatu persoalan, maka bisa akan diadili langsung," sebutnya.

Lantas, bagaimana dengan wacana pimpinan DPR tidak harus dari parpol pemenang pemilu? Dia mengaku hal ini masih disinkronkan dalam Pansus. Sudding optimis isu utama ini bisa selesai bulan depan.

"Itu bagian kecil dari ini. Tapi, suatu hal yang pasti bahwa kita punya semangat yang sama dalam hal tatanan institusi dewan supaya bisa maksimal selesaikan ini bulan Juli," katanya.

Wakil Ketua Pansus RUU MD3, Fahri Hamzah membenarkan bahwa mayoritas anggota setuju dengan wacana pembubaran Banggar. Soalnya, semua anggota DPR tidak ingin lagi ditarik-tarik dalam pusara korupsi karena mengatur soal keuangan.

"Fungsi anggaran akan melekat di semua anggota. Dilaksanakan di tingkat komisi, panitia kerja, dan panitia khusus. Tidak lagi ada Banggar. Jika terkait dengan RAPBN maupun APBNP, fungsinya bakal didukung oleh pansus yang bersifat nonpermanen," jelas politisi PKS itu.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk MD3 mendesak agar pembahasan RUU MD3 dibahas secara transparan. Juru bicara Koalisi, Elisabeth Koesrini mengatakan, pembahasan RUU MD3 penting untuk diawasi dan selalu dievaluasi secara terus menerus.

"Banyak rapat dilakukan secara tertutup dengan pertimbangan yang tidak logis dan seragam. Ini kan dari kontrol publik, rawan konflik kepentingan, dan memuluskan penyalahgunaan wewenang," katanya. ■ SIS